

SKRIPSI

**AKSESIBILITAS PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM BUMDESA
WAGE BERSINAR, DESA WAGE, KECAMATAN TAMAN,
KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR**



Disusun oleh:

Dewi Patmawati
18520154

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

**AKSESIBILITAS PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM BUMDESA
WAGE BERSINAR, DESA WAGE, KECAMATAN TAMAN,
KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



**Disusun oleh:
Dewi Patmawati
18520154**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Desember 2022
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Tim Penguji

1. Ketua Penguji/ Pembimbing
Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si (.....)
2. Penguji Samping I
Drs. Suharyanto, M.M. (.....)
3. Penguji Samping II
Utami Sulistiana, S.P.,M.P (.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Patmawati

Nim : 18520154

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“AKSESIBILITAS PADA UNIT USAHA SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA WAGE BERSINAR DESA WAGE, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR”** dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan menggunakan perspektif *Governability* adalah betul-betul karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh yang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Dewi Patmawati

Nim: 18520154

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Aksesibilitas Pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar mendampingi saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan serta nasehat yang mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.

5. Sekretaris Desa Wage dan Pengurus BUMDesa Wage Bersinar yang telah memberikan dukungan serta izin penelitian.
6. Seluruh keluarga besar Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaat bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Penulis

Dewi Patmawati
NIM: 18520154

MOTTO

“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan”
(Sujiwo Tejo)

“Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci menuju sukses. Jika anda mencintai apa yang anda kerjakan, anda akan menjadi orang sukses”
(Albert Schweitzer)

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki”
(Bambang Pamungkas)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sadar, sehat, dan bahagia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam kehidupan penulis:

1. Untuk Kedua Orang tua saya, Bapak Sutardi tercinta dan Ibu Sujati tercinta, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang serta dukungan yang kalian berikan selama ini dan sampai titik ini.
2. Untuk Kakak kandung saya Noviyanti dan Satriya, terima kasih karena selalu memberi dukungan, selalu memberi semangat, motivasi dan kasih sayang yang luar biasa sampai saat ini.
3. Untuk Mas Gio Prasetyo, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus, memberikan motivasi serta selalu sabar dalam menghadapi keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan didikan dan dinamika belajar dengan ketulusan dan keikhlasan.
5. Untuk dosen pembimbing Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si untuk dosen pembimbing akademik Muhamad Firdaus, S.IP, MA serta seluruh dosen STPMD “APMD” Yogyakarta atas bimbingan serta ilmu yang diberikan selama ini.
6. Untuk sahabat tercinta, Qurnia Fatimah, Aminah, Felinda Kusumawati, Devi Fallyanti, Anastasia Ilam, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan hingga saat ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat praktis.....	5
E. Literatur Review	5
F. Kerangka Konseptual	13
1. Konsep Aksesibilitas	13
2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	14
G. Ruang Lingkup Penelitian	21
H. Metode Penelitian	22
1. Pendekatan Penelitian	22
2. Objek dan Subjek Penelitian	22
3. Tipe Penelitian	22
4. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Teknik Analisis Data	25

BAB II. PROFIL DESA WAGE DAN BUMDESA WAGE BERSINAR.....	27
A. Desa Wage, Taman, Sidoarjo.....	27
1. Kondisi Geografis Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	27
2. Kondisi Demografi Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	28
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	30
4. Budaya Desa Wage, Taman, Sidoarjo.....	31
5. Pemerintahan Desa Wage, Taman, Sidoarjo	32
6. Sarana dan Prasarana Desa Wage, Taman, Sidoarjo.....	33
B. BUMDesa Wage Bersinar	35
1. Profil BUMDesa Wage Bersinar.....	35
2. Visi dan Misi BUMDesa Wage Bersinar	37
3. Deskripsi Unit Usaha BUMDesa Wage Bersinar.....	37
4. Program Jangka Pendek BUMDesa Wage Bersinar	45
BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Terbentuknya Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Wage Bersinar ...	46
B. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Wage Bersinar.....	52
C. Kendala-Kendala Masyarakat Dalam Mengakses Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Wage Bersinar	56
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	24
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan di Desa Wage	34
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan di Desa Wage.....	34
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Bidang Seni dan Olahraga di Desa Wage	35
Tabel 2.4 Capaian Pendapatan Unit Usaha Taman Budaya Januari – Desember 2021	39
Tabel 2.5 Target Revenue Unit Usaha Bina Usaha UMKM Tahun 2021.....	41
Tabel 2.6 Rencana dan Realisasi Omzet Tahun 2021	42
Tabel 2.7 Rencana dan Realisasi Peminjam Modal Tahun 2021	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Desa Wage Kabupaten Sidoarjo	28
Gambar 2.2 Diagram Jumlah Penduduk Desa Wage Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Gambar 2.3 Diagram Jumlah Penduduk Desa Wage Berdasarkan Agama.....	29
Gambar 2.4 Diagram Penghasilan Masyarakat Desa Wage	31

INTISARI

Aksesibilitas Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Wage Bersinar Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

(Dewi Patmawati)

BUMDesa Wage Bersinar bekerja sama dengan pemerintah Desa Wage dalam melakukan peningkatan perekonomian dengan cara memberikan pinjaman modal kepada masyarakat. Pinjaman modal tersebut diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu agar dapat menaikkan perekonomian, salah satunya masyarakat yang bekerja sebagai pedagang berpenghasilan rendah. BUMDesa Wage Bersinar memiliki unit simpan pinjam yang ditujukan bagi masyarakat Desa Wage. Namun dalam praktiknya, persyaratan dalam program simpan pinjam tersebut dianggap menyusahakan masyarakat. Rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana aksesibilitas program desa pada Unit Simpan Pinjam BUMDesa Wage Bersinar Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Aksesibilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kemudahan dan mudah dijangkau masyarakat terkait program BUMDesa Wage Bersinar. Masyarakat Desa Wage menganggap persyaratan pengajuan pinjaman dianggap mudah dan mampu dipenuhi, serta ada masyarakat Desa Wage yang menganggap bahwa persyaratan pengajuan pinjaman dianggap sulit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara BUMDesa Wage Bersinar serta masyarakat Desa Wage. Analisis data dilakukan dengan analisis lapangan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang menyatakan bahwa persyaratan dalam pengajuan pinjaman pada BUMDesa Wage Bersinar mudah dan mampu dipenuhi memaparkan bahwa keharusan memiliki KTP Desa Wage dianggap wajar karena BUMDesa Wage Bersinar memang ditujukan untuk masyarakat Desa Wage dan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Wage. Sedangkan masyarakat yang menganggap persyaratan pengajuan pinjaman BUMDesa Wage Bersinar sulit memaparkan bahwa terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, terdapat pilih kasih atau ketidakadilan dalam pemberian pinjaman, syarat harus KTP Desa Wage seharusnya dapat diganti dengan surat keterangan tinggal atau domisili mengingat sebagian besar masyarakat adalah pendatang yang telah menetap di Desa Wage lebih dari 10 tahun.

Kata kunci: Aksesibilitas, Simpan Pinjam, Badan Usaha Milik Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BUMDesa sebagai organisasi usaha desa yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah urbanisasi dan membangun Indonesia dari pedesaan atau desa. Keberadaan BUMDesa berfungsi sebagai media komunikasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat. Keberadaan BUMDesa sebagai lembaga ekonomi berpotensi membawa perubahan dalam peningkatan kesejahteraan. Keberadaan dan kinerja BUMDesa harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BUMDesa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Padahal, BUMDesa memiliki beberapa program bisnis. Keberhasilan BUMDesa dalam pengelolaan program memerlukan kemampuan perencanaan dan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan alternatif peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu desa yang memiliki BUMDesa adalah Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Desa Wage merupakan desa terbesar kedua di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penduduk 22.257 jiwa.

Desa Wage merupakan kawasan pinggiran kota yang masih mudah dijangkau, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di Desa Wage adalah

para pendatang yang ingin tinggal di pinggiran kota untuk mencari penghidupan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kecamatan Taman, di Desa Wage, sebagian besar penduduk yang hampir mayoritas pendatang di Desa Wage tersebut bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rendah, yang dimana rata-rata penghasilan masyarakat Desa Wage pada kisaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk satu kartu keluarga (KK).

BUMDesa Desa Wager Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bernama BUMDesa Wage Bersinar. Pada praktiknya, BUMDesa Wage Bersinar bekerja sama dengan pemerintah Desa Wage dalam melakukan peningkatan perekonomian dengan cara memberikan pinjaman modal kepada masyarakat. Pinjaman modal tersebut diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu agar dapat menaikkan perekonomian, salah satunya masyarakat yang bekerja sebagai pedagang berpenghasilan rendah.

BUMDesa Wage Bersinar memiliki unit simpan pinjam yang ditujukan bagi masyarakat Desa Wage. Namun dalam praktiknya, persyaratan dalam program simpan pinjam tersebut dianggap menyusahakan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat mengajukan pinjaman maupun untuk mendaftar memerlukan syarat yang dianggap cukup rumit dan kurang adil untuk masyarakat, salah satunya yaitu harus memiliki KTP asli Desa Wage. Mengingat bahwa hampir mayoritas penduduk Desa Wage adalah pendatang yang tidak menetap di wilayah tersebut sehingga tidak semua masyarakat dapat mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pinjaman.

Masyarakat pendatang hanya memiliki surat keterangan domisili setempat sedangkan surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai pelengkap persyaratan pinjaman. Ditambah lagi, dengan adanya persyaratan untuk memberikan jaminan yang memberatkan masyarakat, dan bantuan pinjaman tersebut biasanya hanya diberikan dengan rasa belas kasihan dan mementingkan kepentingan pribadi saja (salah satunya mengutamakan orang terdekat).

Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa dan BUMDesa Wage Bersinar terkesan mempersulit masyarakat dalam perolehan pinjaman. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih percaya dan memilih untuk mengajukan bantuan pada pihak lain (Perbankan dan koperasi simpan pinjam) yang memiliki bunga besar ketimbang bunga pinjaman kepada desa, masyarakat memilih mengambil resiko tersebut dikarenakan terpaksa untuk menaikkan perekonomian.

Pada penelitian ini konsep *Governability* penting untuk digunakan karena dalam proses aksesibilitas program desa untuk masyarakat diperlukan otoritas dan kapasitas pemerintah desa yang responsibilitas dan mumpuni dalam hal ini yang dimaksud yaitu kemampuan Pemerintah Desa Wage dalam memerintah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pemerintah desa harus dapat mengatur keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administratif (Samuel Huntington, 1975).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana Aksesibilitas Pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa. Terkait demikian, maka judul yang digunakan yang diberikan dalam penelitian ini adalah “Aksesibilitas Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Wage Bersinar Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana aksesibilitas pada unit simpan pinjam BUMDesa Wage Bersinar Dewa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat desa?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksploratif dan mendeskripsikan aksesibilitas pada unit simpan BUMDesa Wage Bersinar Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan teori bidang ilmu pemerintahan terutama yang membahas tentang aksesibilitas pada unit usaha simpan pinjam BUMDesa.

2. Manfaat praktis

a. Untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi edukasi kepada masyarakat luas terkait dengan aksesibilitas pada unit usaha simpan pinjam BUMDesa.

b. Untuk civitas akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa dalam memahami teori dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam kajian dengan tema sejenis.

c. Untuk Pemerintah Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses aksesibilitas program desa.

E. Literatur Review

Berikut beberapa penelitian sejenis yang dianggap dapat dijadikan acuan pada penelitian ini:

Pertama, kajian Hanjarwati, Suprihatiningrum, dan Aminah berjudul “Survei Aksesibilitas Sosial dan Fisik Sebagai Dasar Penyusunan Proyek Besar Desa Inklusif”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas fisik dan sosial penyandang disabilitas. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

aksesibilitas sosial di Desa Trimurti sangat baik, tercermin dari sikap yang baik terhadap penyandang disabilitas; ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan dan informasi sangat baik; aksesibilitas fisik menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan fisik tidak dapat diakses, kecuali Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Puskesmas di Srandakan; akses keuangan, kebijakan dan pengetahuan penyandang disabilitas masih sangat terbatas; Penyandang disabilitas tidak memiliki akses terhadap modal dan kesempatan kerja.¹ erbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah pada fokus penelitian di mana penelitian oleh peneliti difokuskan pada aksesibilitas program desa yaitu unit simpan pinjam BUM Desa.

Kedua, penelitian Haryati dan Bzarih berjudul “Analisis Aksesibilitas Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Butin Sulawesi Tenggara dengan Menggunakan Metode *Integrated Rular Accesibility Planning (IRAP)*”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis aksesibilitas infrastruktur pedesaan di Kabupaten Butin, Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan pendekatan *Integrated Accessibility Planning (IRAP)*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Integrated Regulatory Approach Planning (IRAP)*. Hasil kajian menunjukkan bahwa di seluruh lingkungan Kecamatan Kamaru, prioritas utama pengelolaan aksesibilitas adalah sektor air minum. Bidang air bersih di lingkungan Sampoabatu memiliki nilai

¹ Astri Hanjarwati, Jamil Suprihatinigrum dan Siti Aminah, Survei Aksesibilitas Fisik dan Sosial sebagai Dasar Penyusunan Grand Design Desa Inklusif, *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)* 8 (1) 2021.

aksesibilitas tertinggi yaitu 25.333, sehingga lingkungan dan kawasan prioritas pengelolaan aksesibilitas di Kecamatan Kamaru adalah dusun Sampoabatu/lingkungan di lapangan air bersih) adalah pengembangan air minum infrastruktur berupa pembangunan jaringan PDAM, pembangunan hidran umum, dan pembangunan sumber air baku lainnya untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kecamatan Kamaru. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada tempat penelitian dimana penelitian peneliti dilakukan di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga, penelitian Shafira dan Utami berjudul “Akses informasi, sistem pengendalian intern, pelatihan dan akuntabilitas pengelola dana desa: Peran teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh aksesibilitas informasi desa, sistem pengendalian intern, pelatihan perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan teknologi informasi sebagai variabel sensor. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi desa dan sistem pengendalian intern berdampak positif terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa dan penggunaan teknologi informasi memperkuat pengaruh positif sistem pengelolaan dana desa sistem pengendalian intern terhadap tanggung jawab pengelolaan dana. dana desa. Namun, pelatihan kepala desa tidak mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah fokus penelitian dimana penelitian peneliti menitikberatkan pada aksesibilitas program desa yaitu program desa

pemberi pinjaman dan penabung BUMD nya.

Keempat, penelitian Puspa dan Prasetyo berjudul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk menguji secara empiris apakah kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal (SPI), dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.² Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah pada fokus penelitian di mana penelitian oleh peneliti difokuskan pada aksesibilitas program desa yaitu unit simpan pinjam BUM Desa.

Kelima, penelitian Darmadi, Rania, Fitriana dan Setiawan berjudul “Manajemen Orang: Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aksesibilitas penyandang disabilitas di Provinsi Sidoarjo dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dari segi sarana dan prasarana, tetapi juga aksesibilitas mereka terhadap fasilitas kegiatan sosial sesuai dengan prinsip pengelolaan manusia.

² Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo, Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* Vol 20 No 2 September 2020.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi langkah-langkah sesuai dengan kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian meringkas, mereduksi, dan memverifikasi keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip people management sudah mulai diterapkan Kabupaten Sidoarjo terhadap penyandang disabilitas. Pelaksanaan people governance terbagi menjadi tujuh prinsip, yaitu; (a) tanggung jawab sosial; (b) pendidikan kewarganegaraan; (c) kesetaraan dan kebebasan; (d) berpartisipasi; (e) daya tahan (daya tahan); (f) kinerja pengelolaan pemerintahan yang adaptif; (g) keandalan. Dari ketujuh prinsip tersebut, ada prinsip yang sudah dilaksanakan secara maksimal, namun masih ada beberapa yang belum dilaksanakan secara maksimal. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah prinsip partisipasi dan amanah. Sedangkan lima prinsip lainnya belum dilaksanakan secara optimal yaitu; (a) tanggung jawab sosial; (b) pendidikan kewarganegaraan; (c) kesetaraan dan kebebasan; (d) daya tahan (daya tahan); dan, (f) kinerja adaptif pemerintah. Rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukan dukungan pemerintah yang memadai untuk mengimplementasikan humane governance berupa fasilitas umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo agar dapat berfungsi secara optimal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah fokus kajiannya, khususnya masyarakat prasejahtera di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Keenam, Kajian Permadi, Retnowati, Akhyar dan Oktaryani berjudul 'Identifikasi Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas dan Fasilitas' berjudul Desa

Twagunung Tunak Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi atraksi, aksesibilitas, amenitas dan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak yang terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya, kami menemukan ada tiga jenis atraksi di Gunung Tunak: 1) atraksi alam, 2) atraksi budaya, dan 3) atraksi buatan. Gunung Tunak memiliki banyak sarana dan fasilitas wisata. Akses menuju TWA melalui jalan darat, namun akses antar lokasi di dalam TWA masih kurang baik. Taman ini hanya dapat diakses dengan kendaraan pribadi. Ancillary services (layanan tambahan) yang memadai dan terdiri dari jalan dan listrik, mengoordinasikan segala macam kegiatan dan mengoordinasikan peraturan daerah tentang desa liburan. Keunggulan lain penunjang pariwisata di Gunung Tunak adalah adanya badan pengelola (dalam hal ini BKSDA NTB) yang didukung oleh pemerintah daerah dan Kelompok Sadar Wisata Besopoq Tunak. Perbedaan penelitian awal ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah subyek penelitiannya yaitu masyarakat kurang mampu di desa upazila Taman upazila kabupaten Sidoarjo.

Ketujuh, penelitian Nuhayati berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Desa sialang Rindang Kecamatan Tambusai

Kabupaten Rokan Hulu. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa, aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa, dan penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh secara simultan terhadap transparansi pengelolaan dana desa di desa Sialang Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.³ Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah pada fokus penelitian di mana penelitian oleh peneliti difokuskan pada aksesibilitas program desa yaitu unit simpan pinjam BUM Desa.

Kedelapan, penelitian Prabowo, Muluk dan Hayat berjudul “Alternatif Kebijakan Keterbatasan Aksesibilitas Perpustakaan di Kabupaten Malang”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk merekomendasikan alternatif kebijakan keterbatasan aksesibilitas perpustakaan di Kabupaten Malang. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan pemerataan aksesibilitas perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas (jumlah) dari Perpustakaan Desa atau Kelurahan, dan kualitas perpustakaan daerah.⁴ Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh

³ Nurhayati, Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* Volume 4 Nomor 1 Maret 2020.

⁴ Ardian Prabowo, M R Khairul Muluk dan Ainul Hayat, Alternatif Kebijakan Keterbatasan Aksesibilitas Perpustakaan di Kabupaten Malang, *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 4 (2) 2020.

peneliti sekarang adalah pada fokus penelitian di mana penelitian oleh peneliti difokuskan pada aksesibilitas program desa yaitu unit simpan pinjam BUM Desa.

Kesembilan, penelitian Manoppo dan Oktavia berjudul “Aksesibilitas Perempuan terhadap Informasi Pemanfaatan Pekarangan di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui aksesibilitas perempuan terhadap informasi pemanfaatan pekarangan di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan informasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan makanan di Kabupaten Minahasa berada pada kategori mudah diakses. Namun, jumlah informasi yang tersedia dan informasi yang diperlukan masih kurang. Informasi yang tersedia tentang teknik penanaman pangan secara umum masih terbatas. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah fokus penelitian, dimana penelitian peneliti terfokus pada aksesibilitas program desa atau Unit Simpan Pinjam BUM Desa.

Kesepuluh, penelitian Delamartha, Yudana dan Rini berjudul “Kesiapan Aksesibilitas Wisata dalam Mengintegrasikan Objek Wisata (Studi Kasus: Karanganyar Bagian Timur)”. Tujuan dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kesiapan aksesibilitas wisata dalam mengintegrasikan obyek wisata dengan studi kasus di Kabupaten Karanganyar bagian timur. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan aksesibilitas wisata di

Kabupaten Karanganyar bagian timur dalam mengintegrasikan obyek wisata memiliki tingkat kesiapan yang sedang dengan perolehan skor sebesar 11,06.⁵ Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah pada objek penelitian yaitu masyarakat kurang mampu di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

F. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual penelitian ini, akan dipaparkan tentang landasan penelitian yang menaungi kerangka pikir penelitian ini. Kerangka konseptual dipaparkan melalui tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang relevan.

1. Konsep Aksesibilitas

Konsep aksesibilitas adalah kemudahan dimana orang dapat mengakses objek, layanan, atau lingkungan. Dalam arti lain, aksesibilitas adalah ukuran seberapa mudahnya mencapai suatu tempat dari lokasi lain melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas yang mencakup kemudahan waktu, biaya, dan upaya untuk berpindah antar lokasi atau wilayah. Kemudahan akses dimungkinkan pada gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya.

Aksesibilitas diartikan sebagai hal dapat dijadikan akses.

Aksesibilitas dianggap sebagai keterjangkauan atau keadaan mudah

⁵ Andreta Hayu Delamartha, Galing Yudana dan Erma Fitria Rini, Kesiapan Aksesibilitas Wisata dalam Mengintegrasikan Objek Wisata (Studi Kasus; Karanganyar Bagian Timur), *Jurnal Plano Buana* Vol 1 No 2 April 2021.

dijangkau. Aksesibilitas juga dianggap sebagai kemudahan yang disediakan untuk dapat mewujudkan kesamaan kesempatan.⁶

Aksesibilitas adalah penyediaan akses yang sama untuk semua fasilitas dan layanan. Aksesibilitas adalah kemampuan untuk berinteraksi atau dengan mudah menggabungkan barang, jasa, kegiatan, dan tujuan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap orang dengan tujuan untuk mencapai pemerataan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.⁷

Terkait demikian, dapat ditarik garis besar bahwa aksesibilitas adalah ukuran kemudahan oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan serta lingkungan. Aksesibilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kemudahan dan mudah dijangkau masyarakat terkait program BUMDesa Wage Bersinar. Program yang diteliti terkait aksesibilitas adalah pada program unit simpan pinjam BUMDesa Wage Bersinar yang meliputi mudah tidaknya persyaratan pengajuan pinjaman serta mudah atau tidaknya pengaplikasian simpan pinjam oleh masyarakat Desa Wage.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUMDesa adalah sarana yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang menjalankan fasilitas tersebut berdasarkan kebutuhan dan perekonomian desa. BUMDesa dibentuk berdasarkan peraturan

⁶ Arif Maftuhin, *Masjid Ramah Difabel*, (Yogyakarta, LKiS, 2019), h. 55.

⁷ Endang Sri Wahyuni, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik*, (Pekalongan: NEM, 2021), h.34.

perundang-undangan yang mengatur tentang kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDesa adalah untuk meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa. BUMDesa beroperasi sebagai organisasi komersial yang menyediakan sumber daya lokal untuk keuntungan dan sebagai organisasi sosial dengan berpartisipasi dalam produksi layanan sosial untuk kepentingan masyarakat.

BUMDesa memang mencari keuntungan, namun sangatlah berbeda dengan lembaga komersial lainnya.⁸ Adapun cirinya meliputi; a) Badan usaha didesain dan dikelola bersama masyarakat desa; b) Modal usahanya berbagi antara pemerintah desa 51% dari dana desa, kemudian 49% masyarakat desa; c) Bisnis dijalankan dengan prakarsa dan budaya lokal; d) Potensi desa dan hasil informasi pasar menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; e) Laba yang diperoleh BUMDesa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan dan kesepakatan yang telah disusun dan disepakati; f) Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan desa; g) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDesa diawasi secara bersama oleh pemerintah desa, BPD beserta anggota.

Pemerintah Pusat menginisiasi berdirinya BUMDesa dalam upaya implementasi Nawa Cita pertama, ketiga, kelima dan ketujuh. Pada rumusan Nawa Cita tersebut BUMDesa diartikan sebagai: a) Suatu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk menghadirkan institusi yang

⁸ Riant Nugroho dan Fierre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 4: Pembukuan Keuangan BUMDes*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hal. 9.

bernama negara terhadap desa; b) Suatu metode yang kembangkan untuk pembangun Indonesia dari pinggiran, Caranya dengan mengembangkan usaha ekonomi desa; c) Sebuah strategi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat; serta d) Suatu bentuk kemandirian ekonomi desa.⁹

BUMDesa merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pedesaan. Sejak diundangkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014, BUMDesa menjadi sumber kegiatan ekonomi di desa, berfungsi sebagai fasilitas sosial dan komersial. BUMDesa merupakan lembaga keuangan milik desa yang dirancang secara ideal karena BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Landasan BUMDesa diputuskan dalam musyawarah desa; Diharapkan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BUMDesa akan dibutuhkan oleh banyak warga (menjamin penghidupan warga desa); bidang usaha harus nonkomersial (bisnis sosial), namun pelayanan tetap baik dan berkelanjutan; BUMDesa diharapkan hadir PAD Desa; BUMDesa bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa.¹⁰

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa menunjukkan bahwa BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

⁹ Ridha Rizki Novanda, Ketut Sukiyono, Basuki Sigit Priyono, Yessilia Osira, Septi Widiono, Nyanyu Neti Arianti, Musriyadi Nabiu, M Zulkarnain Yuliarso dan Agung Trisusilo, *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar dari BUMDes Mart Sumber Rejo*, (Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019), h. 7.

¹⁰ Riant Nugroho dan Fierre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional dan Bentuk BUMDes*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hal. 13.

BUMDesa merupakan badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, yang selanjutnya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan desa dan masyarakat. BUMDesa sudah ada sebelum UU Desa No. 6 tahun 2014, namun setelah UU ini, BUMDesa semakin strategis. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDesa berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

Selain itu, fungsi BUMDesa terdiri dari;¹¹ a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat; b) sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial; c) sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan.

BUMDesa didirikan oleh masyarakat desa dengan beberapa prinsip antara lain:¹² a) Terbuka, semua warga masyarakat desa dapat mengakses semua kegiatan; b) Sosial, tidak semata-mata mencari keuntungan; c) Independent, pengelola tidak boleh dari unsur pemerintah desa; d) BUMDesa tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan.

Secara garis besar, BUMDesa memiliki dua manfaat yaitu manfaat

¹¹ Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha BUM Des*, (Sleman: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020), h.14.

¹² *Ibid*, h. 15.

komersil dan pelayanan publik. Sebagai lembaga komersil, BUMDesa mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat dalam meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. BUMDesa tidak hanya bergerak dalam bidang bisnis saja tetapi BUMDesa juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial. Pendirian BUMDesa sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran menunjukkan bahwa BUMDesa memiliki tujuan untuk;¹³ a) Meningkatkan perekonomian desa; b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga; e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f) Membuka lapangan kerja; g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BUMDesa memiliki tugas untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam bingkai meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

¹³ *Ibid*, h. 20.

Berikut beberapa jenis usaha dan bisnis pada BUM Desa:¹⁴

a. Usaha Sosial (*social business*)

Merupakan usaha sederhana yang bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan finansial. Usaha ini bersifat pelayanan publik dengan sifat sosial namun tetap memiliki unsur bisnis kepada masyarakat meskipun dari segi keuntungan tidak akan memberikan keuntungan maksimal.

b. Usaha Penyewaan (*renting*)

Usaha dilakukan melalui penyewaan properti yang melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat bertujuan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi desa. Toko tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat desa dalam memperoleh berbagai kebutuhan, alat dan perlengkapan. Jenis persewaan yang dapat dilakukan di kawasan usaha ini adalah persewaan alat angkut, persewaan traktor, persewaan perlengkapan pesta, persewaan toko atau kios, dan persewaan tanah desa yang hak milik telah dialihkan kepada BUM Desa. penyertaan modal.

c. Usaha Dagang (*trading*)

BUMDesa dapat melakukan kegiatan penjualan baik berupa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, maupun

¹⁴ Abdul Rahman Suleman, Erika Revida, Irwan Kurniawan Soetijono, Robert Tua Siregar, Syofyan, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Hery Pandapotan Silitonga, Muhammad Fitri Rahmadana, Marto Silalahi dan Ahmad Syafii, *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 5.

memasarkan barang-barang tertentu untuk kebutuhan masyarakat desa atau ke pasar yang lebih luas.

d. Usaha Perantara (*brokering*)

BUMDesa dapat berperan sebagai perantara barang hasil produksi masyarakat pertanian di pasar yang lebih luas sehingga BUMDes dapat mempersingkat jalur distribusi barang pertanian ke pasar. Cara ini diharapkan dapat mendukung dan berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat petani di desa karena berperan sebagai produsen karena terpisah dari perantara, atau BUMDesa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan BUMDesa berperan sebagai pemasar. Badan pertanian, peternakan, hasil tanaman, kerajinan tangan, agar masyarakat desa tidak kesulitan dalam memasarkan produk dan barang.

e. Usaha Bersama (*holding*)

UMDesa dapat dijadikan sebagai unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa, atau secara lokal, atau BUMDesa dapat membangun sistem usaha terpadu yang dapat diikuti oleh perusahaan desa.

f. Usaha Kontraktor (*contracting*)

BUMDesa dapat menerapkan model koperasi dalam berbagai kegiatan desa seperti melaksanakan proyek desa atau dapat menjadi pemasok bahan baku dan bahan proyek desa, sejak tahun 2018,

pemerintah desa tidak rasional mengundang kontraktor dari luar desa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa.

g. Usaha Keuangan (*banking*)

BUMDesa dapat mengelola lembaga keuangan sehingga dapat membantu warga mengakses keuangan dengan cara yang sederhana dan dengan bunga rendah. Selain dapat meningkatkan produktivitas usaha milik masyarakat desa dari segi permodalan, jenis usaha ini dapat menyelamatkan masyarakat dari rentenir yang sudah ada di desa.

Terkait demikian, dapat ditarik garis besar bahwa BUMDesa adalah badan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal oleh desa dan masyarakat melalui penyertaan modal langsung dari hasil kekayaan atau potensi desa. Pada penelitian ini, BUMDesa yang diteliti adalah BUMDesa Wage Bersinar yang didirikan oleh pemerintah Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Khususnya BUMDesa Wage Bersinar dalam unit usaha simpan pinjam.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan batasa-batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan fokus yang ada di dalam pelaksanaan penelitian ini. Sehingga data dan informasi yang diambil sesuai dengan yang menjadi kebutuhan. Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Aksesibilitas pada unit usaha simpan pinjam BUMDesa Wage Bersinar

2. Kendala dalam mengakses unit usaha simpan pinjam BUMDesa Wage Bersinar

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁵

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian yaitu aksesibilitas Unit Simpan Pinjam BUMDesa Wage Bersinar.

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati. Subjek penelitian ini terdiri dari anggota BUMDesa Wage Bersinar dan masyarakat Desa Wage.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Eksploratif. Penelitian kualitatif eksploratif adalah jenis penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal 16.

peristiwa secara sistematis, jujur dan akurat, menggambarkan fenomena secara rinci dan terkini. Ada beberapa ciri utama dari penelitian eksploratif kualitatif, yaitu fokus pada yang ada, atau masalah/peristiwa yang nyata dan terkini, dan penelitian bertujuan untuk menggali sesuatu hal yang belum banyak diketahui.¹⁶

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada Maret sampai Juli 2022.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara *purposive sampling*, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab, langsung antara penanya atau pewawancara dengan responden atau informan dengan menggunakan suatu alat yang disebut *interview manual*.¹⁷ Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni mengambil informan yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai faktor terbentuknya BUMDesa Wage Bersinar, Pengelolaan unit usaha simpan pinjam, dan kendala-kendala

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal 32.

¹⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal 35.

dalam akses program unit usaha simpan pinjam BUMDesa Wage Bersinar. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan pada informan atau narasumber yang terdiri dari:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Umur (Thn)	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan/ Status
1	Ariadi	50	S1	Ketua BUMDesa Wage Bersinar
2	Ivan	45	S1	Sekretaris BUMDesa Wage Bersinar
3	Windayati	48	S1	Bendahara BUMDesa Wage Bersinar
4	Ayu	37	SMA	Masyarakat/ pedagang
5	Ida	32	SMA	Masyarakat/ pedagang
6	Rohman	40	SMK	Masyarakat/ pedagang
7	Eni	38	SMP	Masyarakat/ pedagang
8	Siti	43	SMA	Masyarakat/ pedagang
9	Sholeh	45	SMK	Masyarakat/ pedagang

Sumber: Data Primer

Kesembilan informan di atas tersebut dipandang memiliki kapasitas dan mengetahui secara langsung untuk memberikan informasi atas apa yang hendak diketahui oleh peneliti.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁸

c. Dokumentasi

¹⁸ *Ibid.*

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen dianggap sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, minimisasi data meliputi meringkas, memilih faktor kunci, memfokuskan pada faktor penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan yang tidak perlu. Sehubungan dengan itu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan kajian jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, representasi data menyajikan data dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram alir, dan teks naratif. Penyajian data berfungsi untuk membantu peneliti memahami apa yang sedang terjadi.

c. Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang dicapai

¹⁹ Sugiyono.

masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti pendukung yang kuat pada pengumpulan data tingkat berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dicapai layak dipercaya.

BAB II

PROFIL DESA WAGE DAN BUMDESA WAGE BERSINAR

A. Desa Wage, Taman, Sidoarjo

1. Kondisi Geografis Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Desa Wage adalah desa di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Desa Wage memiliki luas wilayah 207 hektare dengan ketinggian wilayah 9 meter. Luas tanah sawah di Desa Wage adalah 5 ha dan luas tanah kering di Desa Wage adalah 207 ha. Desa Wage memiliki lokasi yang berdekatan dengan beberapa pabrik. Antara lain pabrik besi dan baja PT Ispat Indo dan pabrik alat rumah tangga PT Maspion. Desa Wage merupakan desa swasembada dan memiliki tiga dusun. Desa Wage merupakan sebuah Desa Urban atau SubUrban di mana merupakan sebuah wilayah yang berada di pinggiran dari perkotaan yang masih mudah dijangkau dan kebanyakan orang-orang yang tinggal di Desa Wage adalah seorang pendatang yang ingin tinggal di wilayah pinggiran perkotaan untuk mencari mata pencaharian.

Secara georgafis Desa Wage berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangah
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungturi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bohar
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pepelegi

Berikut peta wilayah Desa Wage:

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Desa Wage Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Google Maps

2. Kondisi Demografi Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, jumlah penduduk Desa Wage adalah 20.189 jiwa yang terbagi dalam 9.151 dengan jenis kelamin laki-laki dan 11.038 berjenis kelamin perempuan.

Gambar 2. 2 Diagram Jumlah Penduduk Desa Wage Berdasarkan Jenis Kelamin

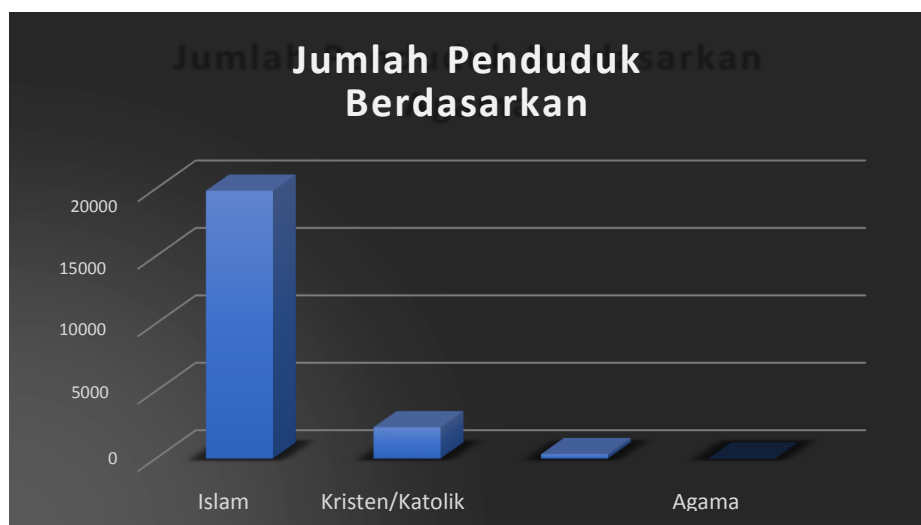


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Wage adalah 7.377 KK. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

Pada Desa Wage, terdapat 9 masjid, 23 musholla atau langgar dan 1 gereja. Sebanyak 19.863 masyarakat Desa Wage memeluk agama Islam, sebanyak 2.325 masyarakat Desa Wage memeluk agama Kristen/Katolik, sebanyak 336 masyarakat Desa Wage memeluk agama Hindu/Budha dan 8 orang memeluk agama lain.

Gambar 2. 3 Diagram Jumlah Penduduk Desa Wage Berdasarkan Agama



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Wage memeluk agama Islam, dan sisanya memeluk agama Kristen/Katolik, Hindu/Budha serta agama lain. Meskipun demikian, penduduk Desa Wage tetap guyup rukun dan dapat saling menghargai antara agama satu dengan yang lain. Hal tersebut membuktikan bahwa

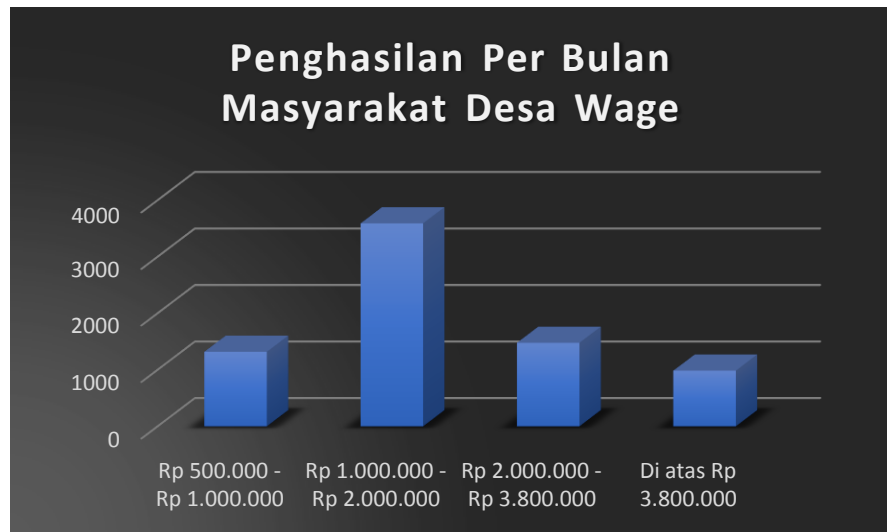
penduduk Desa Wage tidak memandang agama, walaupun tinggal disuatu desa yang sama tetapi kita saling menghargai sesama antar pemeluk agama.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Apabila dilihat dari jenis pekerjaan, sebanyak 743 orang bekerja sebagai pegawai negeri, 189 orang bekerja sebagai TNI, 9 orang bekerja sebagai petani, 8 orang bekerja sebagai buruh tani, 4.786 orang bekerja sebagai buruh swasta, 1.232 orang bekerja sebagai pedagang, 112 orang bekerja pada usaha konstruksi, 13 orang bekerja pada uaha industri atau kerajinan, 412 bekerja sebagai Polri dan 36 orang bekerja pada jasa lainnya.

Apabila dilihat dari jumlah penghasilan masyarakat, diketahui bahwa masyarakat yang berpenghasilan Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 per bulan berjumlah 1.320 Kepala Keluarga (KK), masyarakat yang berpenghasilan Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 per bulan berjumlah 3.592 KK, masyarakat yang berpenghasilan Rp 2.000.000 sampai Rp 3.800.000 per bulan berjumlah 1.479 KK dan masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp 3.800.000 per bulan berjumlah 986 KK.

Gambar 2. 4 Diagram Penghasilan Masyarakat Desa Wage



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

4. Budaya Desa Wage, Taman, Sidoarjo

Kegiatan masyarakat di Desa Wage terbilang masih kental di bidang kebudayaan. Berikut beberapa budaya yang saat ini masih berkembang dan terus dilestarikan di Desa Wage:

a. Hadroh

Hadroh merupakan sebuah kegiatan menyanyikan lagu atau musik rohani yaitu dengan melantukan Sholawat Nabi diiringi dengan alat musik tabuhan, misalnya: rebana, kecrek, bass, marawis, dan sebagainya. Kegiatan hadroh tersebut dilakukan oleh ibu-ibu PKK RW yang tergabung dalam satu grub, kegiatan tersebut tidak hanya ditampilkan pada saat pengajian saja tetapi ditampilkan pada saat hajatan, maupun menyambut tamu-tamu penting.

b. Megengan

Megengan merupakan sebuah kegiatan makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai rasa suka cita untuk menyambut bulan suci Ramadhan.

c. Malam Tirakatan

Malam tirakatan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan masyarakat biasanya untuk memperingati malam 17 Agustus, kegiatan tersebut biasanya diisi dengan makan bersama, penyerahan hadiah lomba, serta penampilan kesenian-kesenian yang ada.

5. Pemerintahan Desa Wage, Taman, Sidoarjo

Desa Wage merupakan salah satu kawasan pinggiran kota yang berkembang pesat, yang saat ini berkembang sebagai daerah penyangga kota Surabaya bersama dengan kampung Bangah, Bohar dan Kedungturi di sekitarnya yang merupakan wilayah administrasi kecamatan Taman.

Dinamika masyarakat Desa Wage mulai terasa dan mengemuka ketika menyelenggarakan pemilihan kades pasca reformasi, di mana terlihat perubahan yang cepat pada era kepemimpinan Kepala Desa saat ini Bapak Bambang Heri Setiyono yang akrab dipanggil dengan Baher dibandingkan dengan masa kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya. Pada era saat ini perkembangan Desa Wage berkembang pesat dan dapat dibuktikan dengan pergerakan yang cukup dinamis ada pada Wage Wetan mengikuti irama aktivitas Pasar Wage yang cenderung paling cepat serta berdirinya kompleks perumahan di beberapa wilayah Desa Wage. Secara

sosiologis, masyarakat Desa Wage masih dapat dikategorikan sebagai desa berkembang (*rural developed village*). Selain itu, Desa Wage berada di antara desa swadaya dan swasembada.

6. Sarana dan Prasarana Desa Wage, Taman, Sidoarjo

Desa Wage memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, terlihat dari berkembangnya Desa Wage dari waktu ke waktu, banyak perubahan yang terjadi baik bidang kesehatan, pendidikan, seni, olahraga, semua sarana dan prasarana tersebut sangat mudah untuk dijangkau oleh seluruh masyarakat Desa Wage. Berikut beberapa sarana dan prasarana di Desa Wage:

a. Sarana dan prasarana kesehatan

Desa Wage memiliki sarana di bidang kesehatan, terbukti dengan ada atau tersedianya Puskesmas Desa dan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang di dalamnya terdapat tenaga kesehatan/bidan yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Selain itu, prasarana yang dimiliki yaitu di Puskesmas sendiri yang memiliki perlengkapan atau alat untuk memeriksa pasien (ruang rawat inap, bed pasien, stetoskop, tensi darah, termometer, timbangan berat badan, alat suntik, dan lain-lain), sedangkan di Polindes terdapat prasarana (bed pasien, stetoskop, suntikan, alat pengecek kandungan, dan lain-lain).

Tabel 2. 1 Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan di Desa Wage

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Puskesmas	1	Baik
2	Pondok bersalin desa	1	Baik

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk menunjang pendidikan masyarakat Desa Wage agar masyarakat dapat menjadi seseorang yang berpengetahuan dan berpendidikan, maka pemerintah Desa Wage mendirikan sekolah PAUD, TK, SD, SMP yang semua tingkat pendidikan tersebut dapat diakses dengan mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk akses lokasi, serta tidak lupa juga di setiap sekolah tersebut juga ditunjang dengan adanya ruang kelas yang dilengkapi dengan meja, kursi, kipas angin/AC, dan tersedia juga ruang laboratorium beserta kelengkapannya dan juga ruang komputer beserta komputernya.

Tabel 2. 2 Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan di Desa Wage

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1	PAUD	2	Baik
2	TK	8	Baik
3	SD	2	Baik
4	SMP/SLTP	1	Baik
5	SMA/SLTA	0	-

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

c. Sarana dan Prasarana Seni dan Olahraga

Pemerintah Desa Wage menyediakan sarana dan prasarana di bidang seni dan olahraga dengan membuat gedung kesenian dan lapangan terbuka hijau. Tempat tersebut berfungsi untuk tempat

pertunjukan kesenian seperti karawithan, campursari dan dangdut, sedangkan lapangan terbuka hijau tersebut berfungsi untuk tempat olahraga yang dapat digunakan untuk seluruh masyarakat Desa Wage. Sarana atau tempat tersebut memiliki prasarana atau alat sebagai pendukung berdasarkan fungsinya, seperti gedung kesenian terdapat alat-alat gamelan, microfon, sound, dan sedangkan yang ada dilapangan terbuka hijau dilengkapi dengan jogging track, alat untuk menguji kekuatan tangan.

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Bidang Seni dan Olahraga di Desa Wage

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung kesenian	1	Baik
2	Lapangan terbuka hijau	1	Baik

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

B. BUMDesa Wage Bersinar

1. Profil BUMDesa Wage Bersinar

BUMDesa Wage Bersinar dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 06/BPD/V/2019 tanggal 4 April 2019. Kemudian disahkan dalam bentuk Peraturan Desa Nomor: 06 Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019 oleh Kepala Desa Wage yaitu Bambang Heri. Selanjutnya, pada awal bulan Juli 2019, dimulai tahapan perekrutan pengurus BUMDesa dengan menggunakan jasa konsultan manajemen untuk melakukan psikotes dan wawancara di hadapan pengurus BPD sehingga di bulan Agustus terpilih pengurus inti BUM Desa. Berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus BUMDesa No 188/17.438.7.7.24/2019 tanggal 19 September 2019, berikut susunan pengurus BUMDesa Wage Bersinar:

Ketua : Bapak Ariadi
Sekretaris I : Bapak Soehargono
Sekretaris II : Bapak Ivan
Bendahara I : Ibu Windayati

Modal awal pengoperasian BUMDesa diperoleh dari penerimaan bunga dari Modal Usaha Ekonomi Desa (UED) Upah sebesar Rp 25.000.000,00 kemudian pengelolaan sewa tanah FASUM di dekat Aspol Wage yang lokasinya sekitar 1.000 m². dibagi menjadi 17 kavling dengan luas masing-masing 3 x 10m dan lahan kosong di depan setiap kavling dialokasikan 3m untuk parkir. Sasaran utama tenant FASUM adalah pemilik usaha yang terletak di pinggir jalan tol yang digusur dari rumahnya oleh Dinas Pekerjaan Umum. Tenant FASUM diprioritaskan pemilik usaha selain simpang tol atau jalan layang terkait dampak penertiban, sedangkan sisanya merupakan warga UMKM Desa Wage. Adanya banyak usaha UMKM yang menyewa lahan dari FASUM dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan ekonomi warga Desa Upah.

2. Visi dan Misi BUMDesa Wage Bersinar

Berikut visi dan misi BUMDesa Wage Bersinar:

a. Visi

“Bersama Membangun UMKM Desa Wage Menjadi Maju dan Bersinar”. Visi tersebut didukung oleh para perangkat desa dan seluruh warga Desa Wage bersinergi membangun desa berwirausaha yang lebih baik dan maju.

b. Misi

“Bekerja sama membangun usaha”.

Hal tersebut diwujudkan oleh BUMDesa Wage Bersinar dengan selalu berusaha dan bersinergi untuk membangun BUMDesa yang maju dan lebih baik.

3. Deskripsi Unit Usaha BUMDesa Wage Bersinar

BUMDesa Wage Bersinar memiliki empat usaha. Berikut deskripsi unit usaha BUMDesa Wage Bersinar:

a. Unit Usaha Properti

Dengan memanfaatkan lahan fasum di jalan Aspol 1 Wage, BUMDesa Wage Bersinar membuat petak-petak menjadi 17 kavling dengan luas masing-masing kavling 3 X 10 meter dan lahan kosong di depan masing-masing kavling dialokasikan 3 meter untuk lahan parkir. Peruntukan yang paling utama dari para penyewa lahan fasum adalah pemilik usaha samping penyeberangan jalan tol yang telah digusur oleh Dinas Pekerjaan Umum, sisanya adalah pelaku UMKM Wage.

Sampai saat ini sudah ada 13 penyewa lahan tersebut yang berarti sudah ada 13 kios yang terbangun dan kesemanya terkoordinasi oleh BUMDesa Wage Bersinar, sedangkan 4 kavling dimanfaatkan oleh warga tanpa koordinasi dengan BUMDesa Wage Bersinar. Masing-masing penyewa dikenakan biaya sewa lahan sebesar Rp 3.000.000 per tahun per kavling dan minimal dua tahun.

b. Unit Usaha Taman Budaya Lapangan Dewata

Unit usaha ini memanfaatkan fasum yang berupa lapangan sepak bola pada awalnya yang kemudian direnovasi sedemikian rupa hingga wajah lapangan tersebut berubah menjadi multi fungsi tidak saja untuk bermain sepak bola melainkan berfungsi mulai dari untuk berbagai jenis olahraga hingga wisata.

Antusias masyarakat Desa Wage dan sekitarnya cukup besar dengan kehadiran wajah baru lapangan Dewata. BUMDesa Wage Bersinar sebagai pengelola telah merumuskan aturan-aturan sedemikian rupa hingga penggunaan lapangan Dewata oleh masyarakat dalam berjalan dengan baik dan tertib. Sebagai unit usaha, BUMDesa Wage Bersinar tentu harus memiliki implikasi bisnis minimal ada profit dari pengelolaan lapangan ini. Bagaimanapun juga ada biaya operasional dalam perawatan lapangan yang mana tentunya menggunakan tenaga kerja. Untuk sementara ini selama masa pandemi Covid-19 BUMDesa Wage Bersinar memanfaatkan jasa parkir sebagai sumber dan memasukkan untuk mengatasi sebagian biaya operasional

lapangan Dewata. Praktiknya, pada kurun waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 meskipun di bawah bayang-bayang masa pandemi Covid-19 masih bisa menyisihkan profit.

Kondisi nyata animo masyarakat terhadap keberadaan lapangan Dewata dengan segala asesoris dapat dilihat dari pendapatan jasa parkir dan pemasukan lain sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Capaian Pendapatan Unit Usaha Taman Budaya Januari – Desember 2021

No	Bulan	Pendapatan (Rp)
1	Januari	-
2	Februari	736.000
3	Maret	827.500
4	April	772.000
5	Mei	2.560.000
6	Juni	4.250.000
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	6.983.000
10	Oktober	4.135.000
11	November	1.014.000
12	Desember	1.993.000
	Jumlah	23.270.500

Sumber: Data internal BUMDesa Wage Bersinar, 2021

Tampak bahwa jumlah pengunjung lapangan Dewata relatif stabil di bulan Februari hingga Maret dan meningkat tajam pada bulan Mei dan Juni. Hal tersebut dikarenakan lapangan dibuka dengan sedikit melonggarkan protokol kesehatan ditambah lagi musimnya mendukung (tidak hujan). Bulan Juli sampai Agustus lapangan ditutup lagi karena maraknya Covid-19 varian Delta. Bulan September mulai dibuka lagi dan tampak lonjakan pengunjung yang tajam namun

berangsur menurun pada bulan November akibat musim hujan. Lonjakan-lonjakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Adanya wahana-wahana hiburan khususnya untuk anak-anak, yang mana pemilik wahana tersebut juga memberikan kontribusi berupa uang sewa.
- 2) Adanya beberapa kegiatan yang sifatnya profesional yang juga berkontribusi menambah pendapatan.
- 3) Bertambahnya para pelaku UMKM yang berjualan di area lapangan, yang mana hal ini juga memberikan kontribusi.

Untuk saat ini, pembagian pendapatan dari unit usaha Taman Budaya adalah:

- 1) 50% dari total pendapatan jasa parkir untuk biaya operasional tenaga kerja
- 2) 50% dari total pendapatan jasa parkir disetor ke BUMDesa Wage Bersinar.

Untuk biaya operasional non tenaga kerja dibebankan ke BUMDesa Wage Bersinar.

c. Unit Usaha Bina Usaha UMKM

Unit usaha ini diharapkan menjadi cikal bakal penggerak perekonomian Desa Wage. Ratusan pelaku UMKM di Desa Wage merupakan tulang punggung perekonomian desa karena sebagian besar warga Wage bermata pencaharian sebagai pelaku UMKM. Unit usaha

ini memiliki target yaitu pembinaan manajemen dan memberikan pinjaman modal usaha. Sayangnya pada masa pandemi ini program pembinaan manajemen belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para UMKM masih konsentrasi pada hal-hal yang bersifat mempertahankan kelangsungan hidup usaha dengan berjalan apa adanya sehingga yang diperlukan adalah pinjaman modal usaha. Terkait demikian, BUMDesa Wage Bersinar harus menyiapkan sejumlah dana untuk mengantisipasi ketika para UMKM mengajukan pinjaman modal. Berikut target unit usaha Bina Usaha UMKM tahun 2021:

Tabel 2. 5 Target Revenue Unit Usaha Bina Usaha UMKM Tahun 2021

Bulan	Omzet (Rp)	Modal yang Dibutuhkan (Rp)	Angsuran Masuk (Rp)	Profit dari Bagi Hasil (Rp)	Jumlah Peminjam (orang)
Januari	20.000.000	20.000.000	0	2.000.000	10
Februari	20.000.000	18.000.000	2.000.000	2.000.000	10
Maret	25.000.000	21.000.000	4.000.000	2.500.000	12
April	25.000.000	18.500.000	6.500.000	2.500.000	12
Mei	25.000.000	16.000.000	9.000.000	2.500.000	12
Juni	30.000.000	18.500.000	11.500.000	3.000.000	15
Juli	30.000.000	15.500.000	14.500.000	3.000.000	15
Agustus	30.000.000	12.500.000	17.500.000	3.000.000	15
September	30.000.000	9.500.000	20.500.000	3.000.000	15
Oktober	30.000.000	6.500.000	23.500.000	3.000.000	15
November	30.000.000	3.500.000	26.500.000	3.000.000	15
Desember	30.000.000	2.500.000	27.500.000	3.000.000	15
Total	325.000.000	162.000.000	163.000.000	32.500.000	161

Sumber: Data internal BUMDesa Wage Bersinar, 2021

Target ini dibuat dengan asumsi bahwa ada penyertaan modal dari pemerintah desa Wage sebesar Rp 175.000.000. Aktualnya dalam kurun waktu bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 terjadi ketidakseimbangan antara permintaan pinjaman dengan ketersediaan

dana. Terkait demikian modal yang dibutuhkan dengan omzet plan seperti tabel menunjukkan bahwa dibutuhkan modal sebesar Rp 162.000.000. Kondisi tersebut relatif aman karena masih di bawah modal yaitu Rp 175.000.000. Ada selisih sebesar Rp 13.000.000 yang akan dipakai sebagai *buffer* apabila terjadi tunggakan-tunggakan angsuran dari para peminjam.

Tabel 2. 6 Rencana dan Realisasi Omzet Tahun 2021

Bulan	Omzet (Rp)	
	Plan	Aktual
Januari	Rp 20.000.000	Rp 4.000.000
Februari	Rp 20.000.000	Rp 36.000.000
Maret	Rp 25.000.000	Rp 111.000.000
April	Rp 25.000.000	Rp 16.000.000
Mei	Rp 25.000.000	Rp 4.000.000
Juni	Rp 30.000.000	Rp 31.000.000
Juli	Rp 30.000.000	Rp 16.000.000
Agustus	Rp 30.000.000	Rp 11.000.000
September	Rp 30.000.000	Rp 17.000.000
Oktober	Rp 30.000.000	Rp 26.000.000
November	Rp 30.000.000	Rp 28.500.000
Desember	Rp 30.000.000	Rp 6.000.000
Total	Rp 325.000.000	Rp 306.500.000

Sumber: Data internal BUMDesa Wage Bersinar, 2021

Terjadinya ketidaksesuaian antara *plan* dan *actual* disebabkan distribusi peminjaman modal yang tidak terkendali dengan kata lain sangat tergantung permintaan. Tampak permintaan sangat fluktuatif seperti pada bulan Maret di mana terdapat permintaan sangat tinggi sehingga di bulan berikutnya harus diatur sedemikian rupa untuk menjaga keseimbangan *cash flow*. Bulan Maret tersebut bertepatan dengan cairnya dana penyertaan modal pemerintah desa Wage.

Tabel 2. 7 Rencana dan Realisasi Peminjam Modal Tahun 2021

Bulan	Jumlah Peminjam (orang)	
	<i>Plan</i>	Aktual
Januari	10	2
Februari	10	19
Maret	12	55
April	12	8
Mei	12	2
Juni	15	8
Juli	15	6
Agustus	15	4
September	15	7
Oktober	15	10
November	15	10
Desember	15	2
Total	161	133

Sumber: Data internal BUMDesa Wage Bersinar, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara *plan* (perencanaan) dengan aktual. Baik itu besarnya permintaan pinjaman modal maupun jumlah peminjamnya. Hal tersebut dikarenakan kehati-hatian pengurus terhadap rekam jejak para peminjam yang dalam perjalanan sudah terbaca oleh pengurusan yang mana ada gejala potensi tunggakan angsuran. Dari 133 peminjam, dapat diklasifikasikan berdasarkan tunggakan angsuran, antara lain:

- 1) Peminjam dengan tunggakan delapan bulan ke atas sebanyak delapan kasus (kategori pinjaman macet)
- 2) Peminjam dengan tunggakan lima sampai tujuh bulan sebanyak 17 kasus (kategori berpotensi macet)
- 3) Pinjaman dengan tunggakan di bawah lima bulan sebanyak 15 kasus (kategori batas wajar).

d. Unit Usaha Simpan Pinjam BKD

Unit usaha ini terbentuk dengan adanya meleburkannya sebuah Badan Kredit Desa yang dulunya beroperasi di bawah naungan BRI dengan pengawasan OJK dan berkantor di Balai Desa Wage. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/PJOK.03/2016 yang intinya bahwa semua BKD memiliki kewajiban bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau menjadi bagian BUM Desa. Seiring berjalannya waktu, diputuskan bahwa BKD yang ada di Desa Wage meleburkan diri menjadi bagian dari BUMDesa Wage Bersinar sebagai salah satu unit usaha yang diberi nama Unit Usaha Simpan Pinjam BKD dan baru terealisasi bulan Agustus tahun 2021.

Unit usaha simpan pinjam BKD ini oleh BUMDesa Wage Bersinar diberi status sebagai unit usaha swakelola artinya unit usaha ini diberikan otoritas dalam pengelolaan manajemens sehingga BUMDesa Wage Bersinar akan terima langsung profit sharingnya dengan perbandingan 60% untuk unit usaha dan 40% untuk BUMDesa Wage Bersinar. Sekilas unit usaha ini sama dengan unit usaha Bina Usaha UMKM yaitu sama-sama bergerak memberikan pinjaman kepada nasabah atau pelanggan namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar keduanya yaitu:

- 1) Unit Simpan Pinjam BKD memberikan pinjaman kepada semua lapisan masyarakat baik konsumtif maupun produktif, sedangkan unit usaha Bina Usaha UMKM memberikan pinjaman hanya kepada pemilik usaha UMKM warga Wage sebagai modal usaha.

- 2) Margin atau interest lebih tinggi unit simpan pinjam BKD daripada unit usaha Bina Usaha UMKM.
- 3) Unit usaha simpan pinjam BKD melayani simpan pinjam, sedangkan unit usaha Bina Usaha UMKM tidak melayani simpan melainkan pinjaman saja.

4. Program Jangka Pendek BUMDesa Wage Bersinar

BUMDesa Wage Bersinar tidak berhenti dalam melakukan ekspansi usaha baik itu yang berkaitan dengan pengembangan unit usaha maupun pembentukan unit usaha baru. Sebagaimana program kerja BUMDesa Wage Bersinar yang memiliki program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, BUMDesa Wage Bersinar senantiasa konsisten dalam melangkah tentu melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari yang relatif mudah dijangkau. Pada laporan pertanggungjawaban tahun 2021 disertai dengan program kerja jangka pendek. Program tersebut bukan pembentukan usaha baru melainkan bentuk diversifikasi usaha dari kolaborasi ketiga unit usaha yaitu unit usaha properti, unit usaha bina usaha UMKM dan unit usaha taman budaya lapangan Dewata. Format usaha tersebut adalah membuat galeri yang dipandu dengan sebuah cafe yang berlokasi di Lapangan Dewata. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan mengajak pihak ketiga, dengan skema Kerjasama Bangun-Guna-Serah (BOT).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim. (2018). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Maftuhin, A. (2019). *Masjid Ramah Difabel*. Yogyakarta: LKiS. Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Novanda, R. R., Sukiyono, K., Priyono, B. S., Osira, Y., Widiono, S., Arianti, N. N., Nabiu, M., Yuliarso, M. Z., & Trisusilo, A. (2019). *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar dari BUMDes Mart Sumber Rejo*. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2020). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Operasional dan Bentuk BUMDes*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 4: Pembukuan Keuangan BUMDes*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, E. (2020). *Inspirasi Sektor Usaha BUM Des*. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, Hasibuan, A. F. H., Silitonga, H. P., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Wahyuni, E. S. (2021). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik*. Pekalongan: NEM.
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta. Prenada Media.

Jurnal

- Darmadi, D., Rania, G., Fitriana, A. R. D., & Setiawan, A. B. (2021). Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 100. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i2.329>

- Delamartha, A., Galing Yudana, & Erma Fitria Rini. (2021). Kesiapan Aksesibilitas Wisata Dalam Mengintegrasikan Obyek Wisata (Studi Kasus : Karanganyar Bagian Timur). *Jurnal Plano Buana*, 1(2), 78–91. <https://doi.org/10.36456/jpb.v1i2.3229>
- Hanjarwati, A., Suprihatiningrum, J., & Aminah, S. (2021). Survei Aksesibilitas Fisik dan Sosial sebagai Dasar Penyusunan Grand Design Desa Inklusif. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i1.24266>
- Haryati, N., & Abzarih, A. W. (2021). Analisis Aksesibilitas Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Butin Sulawesi Tenggara dengan Menggunakan Metode Integrated Rular Accesibility Planning (IRAP). *BANDAR: Journal of Civil Enginerin*, 3(2), 15–21.
- Manoppo, C. N., & Oktavia, Y. (2020). Aksesibilitas Perempuan terhadap Informasi Pemanfaatan Pekarangan di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 2(2). <https://doi.org/10.25077/joseta.v2i2.233>
- Nurhayati, N. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. *HIRARKI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 85–89. <https://doi.org/10.30606/hirarki.v2i1.333>
- Prabowo, A., Muluk, M. R. K., & Hayat, A. (2020). Alternatif Kebijakan Keterbatasan Aksesibilitas Perpustakaan di Kabupaten Malang. *Matra Pembaruan*, 4(2), 119– 133. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.119-133>
- Permadi, L. A., Retnowati, W., Akhyar, M., & Oktaryani, G. S. (2021). Identifikasi Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas dan Ancillary Twagunung Tunak Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah. *Prosiding SAINTEK*, 3.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Shafira, A. Y., & Utami, E. R. (2021). Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Teknologi Informasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4). <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p18>

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Mei 2014.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. *Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. 13 Februari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/PJOK.03/2016 *Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat Dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat*. 27 Januari 2016.
Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wage Kecamatan Tamanan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 06/BPD/V/2019 *Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersinar*. 4 April 2019. Wage.

Surat Keputusan Kepala Desa No 188/17.438.7.7.24/2019. *Pengurus BUMDesa Wage Bersinar*. 3 Mei 2019. Wage.